

## **BAB II**

### **REDD+ DI INDONESIA DAN KERUSAKAN HUTAN DI KALIMANTAN TENGAH**

#### **2.1 REDD+ di Indonesia**

##### **2.1.1 Sejarah REDD+ di Indonesia**

REDD+ di Indonesia terbentuk adalah atas inisiatif Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Alasan program REDD+ dibentuk karena meningkatnya angka deforestasi dan degradasi pada lahan gambut di Indonesia. Indonesia sendiri adalah salah satu negara berkembang yang berperan aktif dan berkomitmen dalam forum mitigasi perubahan iklim, yaitu dalam pengurangan emisi dan deforestasi dan degradasi hutan. Indonesia merupakan negara ketiga pemilik hutan terbesar dengan luas 130 juta ha setelah Republik Kongo dan Brazil.

Keberadaan hutan sendiri menjadi sangat penting untuk kelangsungan dan kesejahteraan masyarakat luas. Hutan sebagai penyedia oksigen dan dapat mengurangi emisi karbon yang menyebabkan pemanasan global. REDD+ mengalami proses evolusi sebagai kebijakan nasional. Adanya REDD+ berawal pada tahun 1990 setelah dilaksanakannya *Rio Earth Summit* di Brazil yang menyatakan pentingnya keseimbangan lingkungan dan terbentuknya *UN Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC) pada tahun 1992. Para peneliti meyakini bahwa peningkatan Gas Rumah Kaca atau *greenhouse gases* (GHG) mengancam lingkungan, kesehatan, keamanan pangan dan semua aktivitas

ekonomi yang bersumber pada alam dan infrastruktur secara fisik. REDD+ bermula dari perdebatan tentang rancangan implementasi konvensi perubahan iklim, terutama Protokol Kyoto. Pada Protokol Kyoto hanya membahas mengenai bagaimana mengelola hutan secara *sustainable* seperti reboisasi dan revegetasi, sementara konservasi hutan dan gas rumah kaca tidak masuk di dalam materi Protokol Kyoto.<sup>30</sup>

Kemudian, pada tahun 2007, terdapat pembahasan mengenai masalah deforestasi dan kerusakan hutan pada COP13 di Bali atau disebut *Bali Action Plan* yang kemudian menjadi dasar hukum dan implementasi REDD+ di Indonesia.<sup>31</sup> COP 13 Bali mengadopsi dua keputusan, BAP sebagai keputusan 1/CP13, dan pengurangan emisi dan deforestasi pada negara-negara berkembang. Di bawah keputusan 1, konsep REDD+ diidentifikasi dalam pernyataan: “Pendekatan kebijakan dan pendorong isu pengurangan emisi dan deforestasi dan degradasi pada negara-negara berkembang: Peran dalam konservasi, menyeimbangkan manajemen hutan dan meningkatkan stok karbon di negara-negara berkembang. Bersama dengan keputusan 2, COP 13 menyebarluaskan lima isu-isu hasil BAP yaitu: (1) pandangan-pandangan REDD, (2) pengukuran, melaporkan dan verifikasi, (3) hak-hak pada masyarakat adat, (4) pilihan pendanaan, (5) aturan institusi. Di mana aktivitas REDD dapat dipertimbangkan sebagai proyek kerja di tingkat nasional.”<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> Natural Resources Development Center, 2013, *Konsep REDD+ dan Implementasinya*, dalam <http://www.nature.or.id/publikasi/laporan-dan-panduan-kehutanan/modul-konsep-redd.pdf>, (7 Januari 2019 12.03 WIB)

<sup>31</sup> *Ibid.*

<sup>32</sup> Retno Maryani, Putra Agung dan Suyanto, 2012, *REDD+ in Indonesia: a Historical Perspective*, World Agroforestry Center, dalam

*Deforestasi*, degradasi hutan, konservasi hutan, dan *sustainable forest management* tercakup di dalam tindakan pencegahan atau mitigasi REDD+. Awalnya, ada REDD yang hanya sebatas membahas deforestasi dan degradasi, kemudian pada COP 14 di Poznan, Polandia, REDD mencakup konservasi hutan dan berubah menjadi REDD+. REDD+ sendiri dalam konsepnya menawarkan pembagian manfaat atau *benefit sharing* berupa insentif atas jasa lingkungan.<sup>33</sup> REDD+ bagian dari kolaborasi badan PBB yaitu, UNEP, FAO dan UNDP. REDD+ dibiayai oleh bantuan internasional, Norwegia merupakan negara pendonor terbesar dalam implementasi program REDD+ terbesar di Indonesia sebesar US\$52.2 juta untuk tahun 2008-20019.<sup>34</sup> Indonesia pada tahun 2009 berkomitmen pada upaya global dalam mengatasi perubahan iklim jangka panjang hingga 2020, saat itu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hadir dalam agenda pertemuan internasional G-20 di Pitsburg dan berkomitmen mengurangi emisi karbon (CO<sub>2</sub>) hingga 26%, dibandingkan dengan skenario (*Business as usual*/tanpa rencana aksi) pada tahun 2020.<sup>35</sup> Hal ini merupakan langkah penting Presiden SBY beriringan dengan program ekonomi meningkat mencapai 7%, dan dengan adanya dukungan internasional SBY berkomitmen untuk mengurangi ERK hingga 41%.<sup>36</sup>

---

<http://old.worldagroforestry.org/sea/Publications/files/workingpaper/WP0162-12.pdf>, (7 Januari 2019 12.15 WIB)

<sup>33</sup> *Ibid.*

<sup>34</sup> *Ibid.*

<sup>35</sup> *Reducing Emission from Deforestation and Degradation (REDD+), Sejarah, Perjalanan REDD+ di Indonesia*, dalam <http://www.reddplusid.org/index.php/sejarah>, (7 Januari 2019 12.03 WIB)

<sup>36</sup> Alfurqon Setyawan, *Di KTT PBB, SBY Paparkan Upaya Pemerintah RI dalam Kelola Hutan*, dalam <https://setkab.go.id/4141/>, (7 Januari 2019 12.30 WIB)

Pada tanggal 26 Mei 2010, Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Norwegia menandatangani surat yang memuat komitmen pendanaan hingga US\$ 1 miliar, bertujuan untuk mendukung upaya Indonesia mengurangi emisi, degradasi dan deforestasi.<sup>37</sup> Satgas REDD+ dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan REDD+ dengan baik melalui Keputusan Presiden No. 19/2010. Ketua Satuan Tugas Lintas Sektor dipimpin oleh Kunto Mangkusubroto. Pada 2010 juga, Provinsi Kalimantan Tengah terpilih sebagai provinsi percontohan dari program REDD+.<sup>38</sup> Pada tanggal 31 Agustus 2013, dibentuk Badan Pengelola REDD+ Republik Indonesia melalui Peraturan Presiden No. 62/2013. BP REDD+ ini setingkat dengan lembaga kementerian Indonesia. BP REDD+ memiliki mekanisme pengelolaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian.<sup>39</sup> Tahun 2015, mengacu pada Peraturan Presiden No. 16/2015 Tentang Pembentukan Kabinet Kerja Periode 2014-2019 REDD+ dilaksanakan atas kerjasama beberapa lembaga kementerian. Tahun 2015, telah terlaksana program REDD+ di Indonesia di bawah koordinasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.<sup>40</sup>

### **2.1.2 Ruang Lingkup dan Startegi Nasional REDD+ di Indonesia**

Saat ini Indonesia dihadapkan pada pilihan keputusan yang vital. Pemerintah Indonesia memiliki komitmen untuk menurunkan kadar emisi gas rumah kaca (GRK) sebesar 26% pada tahun 2020, namun di sisi lain, pemerintah ingin meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 7%. Indonesia menjadi salah

---

<sup>37</sup> *Reducing Emission from Deforestation and Degrdation (REDD+), Op.Cit.*

<sup>38</sup> *REDD+ dan Satgas Kelembagaan REDD+ Sebuah Pengantar, Op.Cit, hal: 1*

<sup>39</sup> *Reducing Emission from Deforestation and Degrdation (REDD+), Op.Cit.*

<sup>40</sup> *Ibid.*

satu penghasil emisi GRK terbesar di dunia akibat tingginya tingkat deforestasinya, yakni mencapai satu juta hektar pertahun. Emisi GRK Indonesia lebih dari sepertiga nya berasal dari kerusakan hutan akibat deforestasi dan lahan gambut. Lahan gambut tersebut dibakar atau dikeringkan dan dikonversi untuk dijadikan lahan pertanian atau hutan produksi seperti untuk produksi bubur kertas kayu (*pulp wood*). Jika tidak dilakukan tindakan pencegahan secara strategis, hutan yang tersisa saat ini diperkirakan akan mengalami deforestasi juga. Pembukaan lahan dan pembakaran hutan gambut akan mengalami oksidasi dan meningkatkan emisi GRK. Indonesia akan terdampak langsung oleh rusaknya hutan dan emisi GRK tersebut. Kelangsungan hidup masyarakat terutama masyarakat desa sekitar hutan juga akan terancam jika pengelolaan SDA dilakukan secara tidak berkelanjutan. Atas dasar di atas, ditetapkanlah Ruang Lingkup Pelaksanaan REDD+ di Indonesia yakni:<sup>41</sup> (1) Penurunan emisi dari deforestasi, (2) Penurunan emisi dari degradasi hutan dan/atau degradasi lahan gambut (3) Pemeliharaan dan peningkatan cadangan karbon melalui: konservasi hutan, pengelolaan hutan yang berkelanjutan, rehabilitasi dan restorasi kawasan yang rusak, penciptaan manfaat tambahan bersama dengan peningkatan manfaat dari karbon melalui: peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal, peningkatan kelestarian keanekaragaman hayati, peningkatan kelestarian produksi jasa ekosistem lain.

---

<sup>41</sup> Natural Resources Development Center, *Modul: Konsep REDD+ dan Impelentasinya*, dalam <https://www.nature.or.id/publikasi/...dan.../modul-konsep-redd.pdf>, hal. 34, (18 Agustus 2018 14.22 WIB).

Strategi nasional REDD+ dilaksanakan dengan berlandaskan pada lima pilar, yaitu:<sup>42</sup> *pertama*, kelembagaan dan proses: Lembaga REDD+, Instrumen pendanaan, Institusi MRV. *Kedua*, kerangka hukum dan peraturan: dilakukan tinjauan hak-hak atas lahan dan mempercepat pelaksanaan tata ruang, meningkatkan penegakan hukum dan mencegah korupsi, menahan izin baru untuk hutan dan lahan gambut selama dua tahun, memperbaiki data tutupan dan perizinan di hutan dan lahan gambut, memberikan insentif untuk sektor swasta. *Ketiga*, program-program strategis: (a) Konservasi dan rehabilitasi: memantapkan fungsi kawasan lindung, mengendalikan konversi hutan dan lahan gambut, restorasi hutan rehabilitasi gambut. (b) Pertanian, Kehutanan, dan Pertambangan yang berkelanjutan: meningkatkan produktivitas pertanian dan perkebunan, mengelola hutan secara lestari, mengendalikan dan mencegah kebakaran hutan dan lahan, mengendalikan konversi lahan untuk tambang terbuka.

*Keempat*, mengubah persepsi dan budaya kerja: penguatan tata kelola kehutanan dan pemanfaatan lahan, pemberdayaan ekonomi lokal dengan prinsip berkelanjutan, serta melaksanakan kampanye nasional dalam aksi “Penyelamatan Hutan Indonesia”. *Kelima*, melibatkan para pihak: berinteraksi dengan berbagai kelompok (pemerintah regional, sektor swasta, NGO, masyarakat adat, lokal dan internasional), mengembangkan sistem pengaman (*safeguards*) sosial dan lingkungan, mengusahakan pembagian manfaat (*benefit sharing*) secara adil dan merata. Dari kelima pilar di atas, kegiatan REDD+ diharapkan dapat mewujudkan pengurangan emisi GRK, peningkatan cadangan karbon, peningkatan

---

<sup>42</sup> *Ibid.*

perekonomian, pemeliharaan keanekaragaman hayati dan jasa lingkungan secara berkelanjutan.

REDD+ di Indonesia memiliki Visi yaitu: Pengelolaan sumber daya alam hutan dan lahan gambut secara berkelanjutan sebagai asset nasional yang dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Misinya yaitu: Mewujudkan visi pengelolaan hutan dan lahan gambut berkelanjutan melalui pengelolaan yang efektif yang dicapai dengan; Menguatkan fungsi lembaga pengelolaan hutan dan gambut; Menyempurnakan instrument hukum dan meningkatkan penegakan hukum; Meningkatkan kapasitas pengelolaan sumber daya hutan dan lahan gambut.<sup>43</sup> REDD+ memiliki tujuan jangka pendek (2012-2014) yakni, tetap pada komitmen Indonesia untuk dapat menurunkan emisi GRK serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan cara memperbaiki kondisi administrasi, kelembagaan, dan iklim investasi secara strategis.

Tujuan jangka menengah (2012-2020), mengelola hutan dan lahan gambut sesuai dengan kebijakan dan tata cara yang ada, serta menetapkan mekanisme keuangan sesuai ketetapan agar target penurunan emisi sebesar 26-41% pada tahun 2020 dapat tercapai. Tujuan jangka panjang (2012-2030), yakni menjadikan hutan Indonesia sebagai sumber penyimpanan karbon (*net carbon sink*) pada tahun 2030 dengan melaksanakan kebijakan yang benar agar fungsi ekonomi dan jasa ekosistem dapat *sustainable*.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> *Ibid*, hal. 35

<sup>44</sup> *Ibid*.

### 2.1.3 Proses Kebijakan REDD+ di Indonesia

Mayoritas proses pengambilan kebijakan tentang REDD adalah *top-down* alasannya karena pihak yang hadir sebagai delegasi di *The Conference of the Parties* adalah pegawai pemerintah pusat. Pemerintah pusat memiliki wewenang untuk mendapatkan informasi tingkat pertama dan dapat menentukan posisi meja perundingan REDD. Pemerintah mengajak berbagai pihak untuk ikut serta dalam mempelajari kerangka skema REDD dengan membentuk *Indonesia Forest-Climate Alliance* (IFCA). Kelompok ini kemudian merumuskan perlunya kerangka kebijakan yang terkait dengan: (1) penentuan acuan tingkat emisi, (2) strategi penggunaan lahan, (3) monitoring, (4) mekanisme keuangan, (5) pembagian keuntungan dan tanggung jawab.<sup>45</sup>

Proses kebijakan yang dilakukan untuk mematangkan kesiapan pelaksanaan REDD di Indonesia adalah dengan mengajukan kerangka kesiapan (*Readiness Plan, R-Plan*) kepada *World Bank*. Selain itu, penilaian dampak REDD terhadap kondisi sosial, lingkungan serta investasi disebutkan dalam rencana penilaian dampak REDD tersebut. Usulan lain juga diajukan kepada UN-REDD, yakni sebuah proyek kerjasama terutama tentang kerjasama lintas sektor di Indonesia oleh badan-badan PBB seperti (FAO, UNEP, UNDP).<sup>46</sup>

Di sisi lain, pihak di luar pemerintah (*civil society* dan *stakeholders*) lebih memilih untuk menunggu ajakan pihak ketiga. Beberapa daerah di Indonesia sudah melaksanakan kegiatan uji coba (*demonstration activities*). Diskusi publik

---

<sup>45</sup> CIFOR, 2010, *REDD: Apakah itu? Pedoman CIFOR Tentang Hutan, Perubahan Iklim dan REDD*. Bogor: CIFOR. dalam [www.cifor.cgiar.org](http://www.cifor.cgiar.org), (18 Agustus 2018 22.29 WIB).

<sup>46</sup> FAO: The Food and Agriculture Organization, UNEP: The United Nations Environment Programme, UNDP: The United Nations Development Programme.



juga telah dilakukan dengan dukungan yang terbatas dari Pemerintah Daerah yang belum sepenuhnya memahami proses REDD. Maka karena itu, dalam tahap persiapan ini, pemerintah akan lebih banyak berdialog dengan para *stakeholders* untuk dapat menempatkan mereka dalam kebijakan REDD pada tingkat nasional maupun tingkat daerah.

Pelaksanaan REDD+ yang melibatkan banyak pihak, terjadinya konflik dan tumpang tindih kepentingan menjadi tidak dapat dihindarkan. Dalam buku panduan Satgas REDD+ dijelaskan tindakan penyelesaian konflik tersebut sebagai berikut: (1) Pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan, penerapan, dan evaluasi mengenai penundaan izin adalah keharusan, (2) Membuat pilihan alternatif penyelesaian konflik SDA yang berdasar pada pemenuhan HAM seperti yang ada di dalam konvensi atau instrumen internasional HAM yang telah diratifikasi dalam hukum nasional, (3) memanfaatkan peluang rekonsiliasi secara efektif berdasar kearifan lokal dan membentuk tim rekonsiliasi yang beranggotakan pihak-pihak independen, (4) membuat peraturan yang mengharuskan NGO untuk menyusun *Standard Operating Procedure* (SOP) yang inklusif dan memenuhi standar HAM.

#### **2.1.4 Perangkat Hukum Pelaksanaan REDD+ di Indonesia**

Perangkat hukum atau peraturan untuk mengatur implementasi REDD+ di Indonesia dirancang oleh pemerintah melalui Kementerian Kehutanan pada saat itu. Ada tiga Peraturan Menteri yang dikeluarkan, yaitu: (1) Permenhut No. P. 68/Menhut-II/2008 tentang Penyelenggaraan *Demonstration Activities*

Pengurangan Emisi Karbon dari Deforestasi dan Degradasi Hutan.<sup>47</sup> Peraturan ini mengatur proses permohonan dan validasi kegiatan percontohan REDD agar metodologi, teknologi dan kelembagaan REDD dapat dicoba dan dievaluasi. (2) Permenhut No. P. 30/Menhut-II/2009 tentang Tata Cara Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan.<sup>48</sup> Peraturan ini mengatur tentang prosedur pelaksanaan REDD seperti persyaratan yang harus dipenuhi oleh pengembang, verifikasi, dan sertifikasi, serta hak dan kewajiban pelaku REDD. Peraturan ini juga mengharuskan adanya kelayakan ekonomi sebagai salah satu syarat penerimaan permohonan kegiatan REDD. (3) Permenhut No. P. 36/Menhut-II/2009 tentang Tata Cara Perizinan Usaha Pemanfaatan Penyerapan Hutan dan/atau Penyimpanan Karbon pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung.<sup>49</sup> Peraturan ini mengatur tentang perizinan pemanfaatan secara komersial penyerapan dan penyimpanan karbon di hutan produksi atau hutan lindung. Peraturan ini juga berisi tentang pengaturan keuangan, aturan pungutan, setoran dan penggunaan penerimaan negara dari anggaran REDD. Peraturan ini membedakan kegiatan penyerapan dan penyimpanan karbon di berbagai jenis hutan dan jenis usahanya. Sementara itu, Permenhut P. 36 juga memuat peraturan tentang Pemanfaatan Jasa Lingkungan (PJL) mengenai penyerapan dan penyimpanan karbon. Kegiatan PJL tersebut secara langsung ataupun tidak langsung sudah diatur dalam berbagai peraturan hukum.

---

<sup>47</sup> Permenhut No. P. 68/Menhut-II/2008 dalam [www.dephut.go.id/files/P68\\_08.pdf](http://www.dephut.go.id/files/P68_08.pdf) (18 Agustus 2018 22.20 WIB).

<sup>48</sup> Permenhut No. P. 30/Menhut-II/2009, dalam [www.dephut.go.id/files/P30\\_09\\_r.pdf](http://www.dephut.go.id/files/P30_09_r.pdf) (18 Agustus 2018 22.21 WIB).

<sup>49</sup> Permenhut No. P. 36/Menhut-II/2009 [www.dephut.go.id/files/P36\\_09.pdf](http://www.dephut.go.id/files/P36_09.pdf), (18 Agustus 2018 22.22 WIB).

Ketiga peraturan tersebut memiliki referensi pembentukan yang berbeda meskipun sama-sama berhubungan dengan REDD+. Dua dari tiga peraturan tersebut merupakan *follow up* dari putusan *The Subsidiary Body of Scientific and Technological Advice* (SBSTA)<sup>50</sup> pada COP 13 di Bali untuk menyelenggarakan bermacam kegiatan uji coba. Peraturan-peraturan di atas dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan REDD+ baik mengawasi mekanisme berbagi manfaat (*sharing benefit*), rentang waktu pelaksanaan, urusan hukum, penyelesaian perkara dan lain-lain. Contoh peraturan yang memuat pemanfaatan jasa lingkungan sebagai berikut: (1) UU No. 50 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Pasal 34 ayat 3 hutan dimanfaatkan untuk kegiatan wisata dan rekreasi, pemerintah dapat memberikan hak pengusahaan atas zona pemanfaatan taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam dengan mengikutsertakan rakyat. (2) UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, Pasal 26 Ayat 1 Tentang Pemanfaatan Hutan Lindung Dapat Berupa Pemanfaatan Kawasan, Pemanfaatan Jasa Lingkungan, Dan Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu. (3) PP No. 6 tahun 2007 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Perencanaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan, Pasal 1 ayat 6 Tentang Pemanfaatan Jasa Lingkungan Adalah Kegiatan Untuk Memanfaatkan Potensi Jasa Lingkungan Dengan Tidak Merusak Dan Mengurangi Fungsi Utamanya.

---

<sup>50</sup> SBSTA atau *The Subsidiary Body of Scientific and Technological Advice* adalah Badan di bawah naungan UNFCCC yang bertanggung jawab memberi masukan atau saran pada COP dalam bidang ilmiah, teknologi dan metodologi. Adapun tugas utamanya adalah mempromosikan pengembangan dan transfer teknologi yang ramah lingkungan dan melakukan pekerjaan teknis untuk meningkatkan pedoman dalam menyiapkan komunikasi nasional dan inventarisasi emisi. dalam <https://unfccc.int/process/bodies/subsidiary-bodies/sbsta>, (3 September 2018 10.12 WIB).

### 2.1.5 Pendanaan REDD+ di Indonesia

Pada pertemuan G-20, Presiden Indonesia saat itu Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan komitmen dalam upaya pengurangan emisi GRK di Indonesia. Indonesia mempunyai target penurunan emisi GRK sebesar 26%-41% pada tahun 2020 dengan melaksanakan *bussines-as-usual* (bisnis seperti biasa) dan melalui dukungan berupa insentif dari negara donor untuk dapat mewujudkan komitmen tersebut. Sebagai tindakan konkritnya, pada tanggal 26 Mei 2010 Pemerintah Indonesia menandatangani Surat Niat (*Letter of Intent*) REDD+ dengan Pemerintah Norwegia.<sup>51</sup> Kesepakatan tersebut merupakan dasar resminya kemitraan program REDD+ antara dua negara dalam upaya pengurangan emisi GRK, deforestasi dan kerusakan hutan. Sebagai negara donor, Norwegia memberikan insentif awal total US\$ 1 Milyar. Pemberian insentif tersebut akan dilakukan secara bertahap dan besarnya tergantung hasil kinerja yang telah diperiksa dan diverifikasi. Hal tersebut seperti kontribusi terhadap kegiatan *low carbon development*, peningkatan kapasitas dan aktivitas pendukung REDD+ lainnya di Indonesia.

Melalui Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2010, pada tanggal 20 September 2010, Presiden membentuk Satuan Tugas Persiapan Pembentukan Kelembagaan REDD+ (Satgas REDD+) untuk mengawal proses persiapan implementasi REDD+ di Indonesia.<sup>52</sup> Satgas REDD+ mempunyai tugas utama

---

<sup>51</sup> Satgas REDD+, *Laporan Akhir Tugas: Satuan Tugas Persiapan Pembentukan Kelembagaan REDD+*, dalam <https://agungwi.files.wordpress.com/2012/07/laporansatgastothepresident.pdf>, (19 Agustus 2018 15.30 WIB).

<sup>52</sup> *Ibid.*

salah satunya adalah membuat kerangka struktur fungsional lembaga REDD dan bertanggung jawab untuk mengelola pendanaan REDD+.<sup>53</sup> Perlu adanya penyelarasan kepentingan antara kedua negara untuk dapat membentuk instrument pendanaan tersebut. Maka dari itu, hal utama yang penting dalam proses pendanaan yang tertuang dalam LoI adalah hal yang sangat krusial, karena pemberian insentif kontribusi dilakukan berdasarkan capaian pengurangan emisi GRK yang dihitung secara periodik, termasuk seluruh kegiatan penyiapan perangkat atau peraturan; Dilakukan berdasar standar internasional, utamanya dalam penggunaan *safeguards* keuangan, lingkungan dan perlindungan sosial; Transparansi dalam semua hal yang menangkut operasional pengelolaan dana; Ada keterlibatan pemerintah pusat, Pemda, masyarakat sipil, dan komunitas masyarakat adat atau lokal sebagai bagian dari struktur tata kelola; Penyaluran dana berupa Bantuan Pembangunan Pemerintah atau *Official Development Assistance* (ODA); Diaudit setiap tahun oleh auditor independen; Memperoleh persetujuan dan Mitra pembangunan yang terkait.<sup>54</sup>

Untuk menjaga agar kegiatan-kegiatan REDD+ yang sudah direncanakan tetap berkesinambungan, para pihak yang terlibat dalam mekanisme pendanaan harus bisa membuat mitra pembangunan lain (selain Norwegia) tertarik. Untuk itu, proses ini harus dilaksanakan dengan standar internasional agar efisien, efektif, cepat dan fleksibel. Agar tujuan serta manfaat REDD+ dapat diterima secara luas, perlu adanya keterlibatan lembaga lokal dan internasional dalam berbagai kegiatan REDD+. Gagasan prosedur yang paling ideal yakni menjadikan

---

<sup>53</sup> *Ibid.*

<sup>54</sup> *Ibid*, hal. 75.

institusi keuangan nasional sebagai pengelola, dan membuat batasan kapasitas institusi internasional. Akuntabilitas dan peran lembaga nasional yang ada sangat berpengaruh pada tingkat keberhasilan implementasi kegiatan REDD+. Akuntabilitas penting agar lembaga dapat melaksanakan tugas dengan baik. Prosedur tersebut diharapkan bisa mengalirkan dana secara efektif dan cepat, dan selalu mengedepankan prinsip akuntabilitas dan transparan.

## **2.2 REDD+ dan Kaitannya dengan Ekonomi Hijau**

Ekonomi hijau (*Green Economy*) memang belum terlalu populer di Indonesia. Ekonomi hijau lebih banyak digunakan oleh negara maju untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Penerapan ekonomi hijau tidak hanya pada sisi teknologi namun juga dari sisi efisiensi energi dan kelestarian lingkungan.<sup>55</sup> Dalam rangka mewujudkan pembangunan yang *pro-poor*, *pro-growth* tanpa merusak lingkungan, negara-negara di dunia termasuk Indonesia akan memilih Ekonomi Hijau sebagai acuan dasar pembangunannya. UNEP mendefinisikan Ekonomi Hijau sebagai kegiatan ekonomi yang bisa meningkatkan kesejahteraan manusia, berkeadilan sosial, dan secara bersamaan dapat mengurangi kerusakan lingkungan dan kelangkaan SDA.<sup>56</sup>

Indonesia sendiri saat ini sedang memulai sebuah program model ekonomi hijau yang akan diterapkan dalam proyek pembangunan dengan

---

<sup>55</sup> UN REDD Programme, *REDD+ and Green Economy: Opportunities for a Mutually Supportive Relationship*, dalam <https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications...files/8424.pdf>, (19 Agustus 2018 19.07 WIB).

<sup>56</sup> UNEP, *Integrating REDD+ into a green economy transition Opportunities and challenges*, dalam <https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications...files/8424.pdf>, ( 19 Agustus 2018 23.20 WIB).

*Reducing Emission from Deforestation and Degradation* (REDD+) yang diharapkan menjadi jalan yang tepat bagi Indonesia untuk mewujudkan ekonomi hijau dan dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah karbon dan ramah lingkungan. Heru Prasetyo, Deputi I bidang perencanaan dan Hubungan Internasional Unit Kerja Presiden untuk Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan (UPK4) dalam acara *Journalist Class* “Transisi Ekonomi Hijau dan Peran Program REDD+” menyampaikan jika, Indonesia perlu melaksanakan pembangunan ekonomi yang *not business as usual*, dan perlu menerapkan ekonomi hijau untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat tanpa merusak lingkungan. Hal senada juga disampaikan oleh Dosen Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor, Prof Akhmad Fauzi yang mana menurutnya pembangunan yang hanya *business as usual* seperti saat ini telah mengorbankan biaya lingkungan yang cukup mahal.<sup>57</sup>

Selama kurun waktu sepuluh tahun terakhir, banyak negara tropis yang telah melaksanakan REDD+. Terdapat lebih dari 330 inisiatif REDD+ di seluruh dunia.<sup>58</sup> Penelitian telah melihat rancangan dan operasinya dari berbagai sudut yakni sosial, ekonomi, dan lingkungan. Awalnya, REDD+ ditujukan sebagai upaya menjaga stok karbon hutan, ditambah beberapa manfaat lain bagi keragaman hayati dan masyarakat. Apabila dilaksanakan secara tepat, REDD+ akan memberikan alternatif pilihan baru dengan sistem pendanaan baru dalam

---

<sup>57</sup> *Ibid.*

<sup>58</sup> Christopher Matius, *REDD+ dan Ekonomi Hijau*, dalam <https://forestsnews.cifor.org/38723/redd-dan-ekonomi-hijau?fnl=id>, (17 Agustus 2018 13.08 WIB).

upaya mengurangi krisis hutan.<sup>59</sup> Kegiatan REDD+ yang sudah dilaksanakan memberikan estimasi bagaimana pembangunan rendah karbon pada ekonomi hijau yang dapat menjadi instrumen penting untuk menghasilkan hal baik yang bermanfaat bagi *sustainable development*.

Ekonomi hijau sebagai konsep baru yang berupaya mewujudkan *sustainable development* dan meraih manfaat di bidang ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. Jika diperhatikan lagi, REDD+ banyak mengadopsi ciri konsep ekonomi hijau, seperti: (1) REDD+ mendukung *low carbon development*, (2) menciptakan banyak jasa ekosistem, (3) menurunkan tingkat deforestasi dan degradasi hutan, (4) menaikkan tingkat ketahanan pada perubahan lingkungan. Pelaksanaan REDD+ dengan memakai bermacam cara dapat memberikan berbagai halangan dan harapan sekaligus. REDD+ berguna untuk mendukung ekonomi hijau dan dalam pelaksanaannya dibutuhkan kesinambungan antara unsur kebijakan dan perencanaan yang matang serta partisipasi aktif dari berbagai kelompok kepentingan termasuk sektor swasta.<sup>60</sup>

Oleh karena itu, komitmen untuk menerapkan REDD+ menjadi tantangan bagi pemerintah dan pelaku bisnis dalam rangka kesiapan penerapan ekonomi hijau di Indonesia. Menurut Koordinator Unit Kerja Instrumen Pendanaan program REDD+, Agus Sari menjelaskan jika pelaksanaan ekonomi hijau bagi bangsa Indonesia menjadi pilihan satu-satunya untuk mewujudkan

---

<sup>59</sup> UNEP, *Integrating REDD+ Into a Green Economy Transition Opportunities and Challenges*, Op. Cit.

<sup>60</sup> UNEP, *Membangun Modal Alam: Bagaimana REDD+ Dapat Mendukung Ekonomi Hijau*. Interational Resource Panel, dalam <http://www.resourcepanel.org/file/398/download?token=ZmbTvXVE>, (19 Agustus 2018 14.09 WIB).



pertumbuhan ekonomi yang lebih ramah lingkungan.<sup>61</sup> Di dalam ekonomi hijau, cecara bersamaan aspek pelestarian lingkungan dan pertumbuhan ekonomi akan berjalan. Maka dari itu, program REDD+ dianggap dapat menjadi pilihan penyelesaian dan keberlangsungan pembangunan yang berkelanjutan sekaligus menjadi solusi pengurangan dampak perubahan iklim.

### 2.3 Masalah Utama Kerusakan Hutan dan Lahan di Kalimantan Tengah

Kebakaran hutan dan lahan masih menjadi permasalahan yang belum terselesaikan dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir di Indonesia. Pada tahun 1997-1998 hutan di wilayah Sumatera, Kalimantan dan Papua, di mana lebih dari 2.000.000 ha lahan gambut terbakar dan menjadi salah satu penyebab emisi GRK yang cukup besar bagi perubahan iklim global.<sup>62</sup> Tahun 2015 hutan seluas 1,7 juta hektar terbakar.<sup>63</sup> Dari 77.000 hektar hutan yang berada di Kalimantan Tengah 35,9% dari luasan tersebut adalah lahan gambut.<sup>64</sup> Penyebab kebakaran hutan dan lahan ini dikarenakan adanya alih fungsi hutan menjadi perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kotawaringin Timur.<sup>65</sup> Kebakaran hutan di

---

<sup>61</sup> *Ibid.*

<sup>62</sup> Adinugroho WC., I NN Suryadiputra, BH Saharjo, dan L Siboro. 2005. *Panduan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Gambut. Proyek Climate Change, Forests and Peatlands in Indonesia*. Wetlands International – Indonesia Programme dan Wildlife Habitat Canada. Bogor. Indonesia dalam *Kebakaran Hutan Dan Lahan: Sebuah Tinjauan Analisis Kelembagaan* dalam [https://www.academia.edu/21084630/Kebakaran Hutan Dan Lahan Sebuah Tinjauan Analisis Kelembagaan?auto=download](https://www.academia.edu/21084630/Kebakaran_Hutan_Dan_Lahan_Sebuah_Tinjauan_Analisis_Kelembagaan?auto=download), (19 Agustus 2018 20.30 WIB).

<sup>63</sup> Dwikora Karnawati. *Pelajaran dari Kebakaran Hutan dan Lahan*, dalam <https://nasional.kompas.com/read/2015/10/30/18000081/Pelajaran.dari.Kebakaran.Hutan.dan.Lahan>, (20 Agustus 2018 21.19 WIB).

<sup>64</sup> WRM, *Pembakaran Hutan dan Korban yang Dihukum: Kisah tentang Tragedi Masyarakat Adat Delang di Lamandau, Kalimantan Tengah*, dalam <https://wrm.org.uy/other-relevant-information/pembakaran-hutan-dan-korban-yang-dihukum-kisah-tentang-tragedi-masyarakat-adat-delang-di-lamandau-kalimantan-tengah/>, (20 Agustus 2018 21.21 WIB).

<sup>65</sup> Mashudi Noorsalim, *Pengaruh Pembangunan Perkebunan Sawit Terhadap Masyarakat Pedalaman Kalimantan*, dalam

Kalimantan Tengah tak terlepas dari tiga persoalan besar yang saling terkait, yaitu (1) Tingginya deforestasi dan lahan kritis akibat pembalakan hutan, (2) ekspansi perkebunan sawit yang tidak terkendali, (3) pola penguasaan lahan oleh korporasi yang terlalu luas.

*Pertama*, terkait deforestasi, Badan Pengelola REDD+ mencatat 80% hutan di Kalimantan Tengah beralih fungsi menjadi perkebunan sawit maupun pertambangan.<sup>66</sup> Hal ini membuat Kalimantan Tengah menjadi provinsi dengan deforestasi tertinggi di Indonesia. Angka deforestasi di Kalimantan Tengah pada periode 2006-2009 mencapai 128.846 hektar per tahun.<sup>67</sup> Hilangnya hutan meningkatkan luasan lahan kritis. Berdasarkan data Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2010, luas lahan kritis di Kalimantan Tengah mencapai 7 juta hektar lebih. Saat ini dari hutan yang tersisa, sekitar 7,27 juta ha mengalami kerusakan, dan per tahunnya tingkat kerusakan mencapai 150.000 ha.<sup>68</sup> Kondisi ini membuat Kalimantan Tengah mempunyai resiko besar terhadap kebakaran hutan dan lahan.

Hutan-hutan tropis basah yang masih baik keadaannya mempunyai tingkat ketahanan yang baik terhadap kebakaran namun kemungkinan terbakar setelah periode kemarau yang panjang masih ada. Sebaliknya, hutan-hutan yang telah dirusak, akan mengalami degradasi, dan ditumbuhi semak belukar, hal

---

[http://interseksi.org/archive/publications/essays/articles/pengaruh\\_sawit.html](http://interseksi.org/archive/publications/essays/articles/pengaruh_sawit.html), (20 Agustus 2018 21.23 WIB).

<sup>66</sup> Untung Setiawan, 80 *Persen Hutan Kalimantan Tengah Beralih Fungsi*, dalam <https://www.antaranews.com/berita/466282/80-persen-hutan-kalimantan-tengah-beralih-fungsi>, (20 Agustus 2018 21.36 WIB).

<sup>67</sup> Badan Planologi Kementerian Kehutanan, *Statistik Bidang Planologi Kehutanan tahun 2011*, dalam *Laporan Pemantauan Kejahatan Sektor Kehutanan di Wilayah Moratorium Kalimantan Tengah*, dalam <http://www.forda-mof.org/index.php/berita/post/1045>, (20 Agustus 2018 20.35 WIB).

<sup>68</sup> WRM, *Op. Cit*, hal. 2.

tersebut akan jauh lebih beresiko akan terjadinya kebakaran. Akhirnya lahan kritis tersebut dimanfaatkan Pemerintah Kalteng untuk dijadikan perkebunan sawit. Namun ternyata, bukan hanya lahan kritis yang berubah menjadi perkebunan sawit, hutan alam yang belum terganggu pun diubah menjadi perkebunan sawit.<sup>69</sup> Berbagai proses alih fungsi hutan tersebut merusak ekosistem hutan yang awalnya kuat, menjadi rentan terjadi kebakaran. Keadaan ini diperburuk dengan adanya fenomena iklim El Nino, telah menyebabkan kebakaran besar selama 20 tahun terakhir.<sup>70</sup>

*Kedua*, terkait ekspansi perkebunan sawit, korporasi perkebunan sawit mulai beroperasi di Kalimantan Tengah tahun 1992. Investor perusahaan sawit semakin mudah untuk berinvestasi di Kalteng dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 1993 tentang Tata Ruang Kalimantan Tengah.<sup>71</sup> Pemberian izin pembangunan perkebunan sawit dan pertambangan yang menyalahi peraturan mengakibatkan terjadinya perluasan perkebunan kelapa sawit dan tambang secara besar-besaran dan tanpa kendali dengan mengonversi hutan, lahan gambut dan lahan pertanian.

Ada perusahaan yang total luasan izin yang diberikan melebihi atau hampir menyamai luasan lima kabupaten. Seperti di Kabupaten Lamandau, di mana masyarakat Delang berada dengan luas wilayah 614.400 hektar, Kabupaten Lamandau memberikan izin korporasi seluas 530.526 hektar. Kabupaten Barito

---

<sup>69</sup> The Institute for Ecosoc Rights, *Palm Oil Industri and Human Rights*, dalam WRM, *Op. Cit.*, hal. 3.

<sup>70</sup> *Ibid.*

<sup>71</sup> Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah, *Sejarah Perkebunan Kelapa Sawit di Kalimantan Tengah*, dalam <http://aminjaya.desa.id/berita/detail/sejarah-perkebunan-kelapa-sawit-di-kalimantan-tengah>, (20 Agustus 2018 22.03 WIB).

Utara dengan total ijin seluas 1.452.468 hektar, sementara luas kabupaten hanya 830.000 hektar. Kabupaten Kapuas total luas ijin 1.761.579 hektar sementara luas wilayahnya hanya 1.499.900 hektar. Kabupaten Gunung Mas, misalnya total luas ijin 996.251 hektar dengan luas wilayah 1.080.400 hektar. Kabupaten Barito Timur total ijin 359.043 hektar dengan luas wilayah 383.400 hektar.<sup>72</sup>

*Ketiga*, terkait penguasaan lahan oleh korporasi, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Kalimantan Tengah mencatat, dari 15,3 juta hektar luas Kalimantan Tengah, 12,7 juta hektar (lebih dari 80 persen) dikuasai oleh investor, baik Hak Penguasaan Hutan (HPH), perkebunan sawit maupun pertambangan.<sup>73</sup> WALHI Kalimantan Tengah menegaskan jika seperti di daerah lain, kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah terjadi akibat penguasaan lahan oleh korporasi yang terlalu luas dan kurang terkendali. Tahun 2015, WALHI mencatat ada 17. 676 titik api di Kalimantan Tengah dan mayoritas berada di konsesi perusahaan. Studi yang dilakukan oleh Sahat Pasaribu dan Friyanto Supena menjelaskan jika penyebab kebakaran hutan di Kalimantan berkaitan dengan *landclearing* untuk persiapan penanaman komoditas perkebunan.<sup>74</sup> Selain itu, ladang yang menggunakan sistem gilir balik juga

---

<sup>72</sup> The Institute for Ecosoc Rights, *Palm Oil Industri and Human Rights*, dalam <https://www.jus.uio.no/smr/.../report-palm-oil-industry-and-human-rights-2015.pdf>, (20 Agustus 2018 22.25 WIB).

<sup>73</sup> WRM, *Op. Cit.* hal. 3

<sup>74</sup> Sahat Pasaribu dan Friyanto Supena, *Memahami Penyebab Kebakaran Hutan Dan Lahan Serta Upaya penanggulangannya: Kasus Di Provinsi Kalimantan Barat*, Paper dalam <https://media.neliti.com/media/publications/44013-ID-memahami-penyebab-kebakaran-hutan-dan-lahan-serta-upaya-penanggulangannya-kasus.pdf>, (21 Agustus 2018 19.04 WIB).

menyebabkan kebakaran lahan sebesar 20% dari total keseluruhan yang terbakar.<sup>75</sup>

#### 2.4 Inisiasi Proyek REDD+ di Provinsi Kalimantan Tengah

Luasnya hutan dan lahan gambut di Kalimantan Tengah menjadi daerah penting di Indonesia untuk mitigasi perubahan iklim. Pada tahun 2010, Provinsi Kalimantan Tengah dipilih sebagai provinsi percontohan REDD+ yang membuatnya menjadi pusat dari seluruh upaya untuk menyatukan pembangunan rendah karbon dan pertumbuhan ekonomi hijau dengan perencanaan ekonomi, penggunaan lahan dan perencanaan pembangunan. Kajian tentang emisi karbon di Provinsi Kalimantan Tengah memperkirakan bahwa dengan skenario *business as usual*,<sup>76</sup> emisi diperkirakan bertambah dari 300 MtCO<sub>2</sub> di 2005 menjadi 430 MtCO<sub>2</sub> di tahun 2015.<sup>77</sup>

Alih fungsi hutan dan lahan gambut seluas 5,8 juta ha yang dijadikan lahan pertanian, pertambangan dan hutan produksi menjadi faktor dominan penyebab emisi GRK. Akibatnya, sekitar 30% dari total cadangan karbon provinsi terancam hilang. Penelitian menunjukkan jika pembakaran hutan untuk tujuan alih fungsi hutan dan lahan gambut menjadi penyumbang emisi terbesar, diikuti

---

<sup>75</sup> Brian L. Djumaty dan Nina Putri Hayam Dey, *Dilema Kebijakan Yang Pro Rakyat*, 2015, *Kritis*, Vol. XXIV, No. 2, Jurnal dalam [https://www.academia.edu/35294268/DILEMA\\_KEBIJAKAN\\_YANG\\_PRO\\_RAKYAT](https://www.academia.edu/35294268/DILEMA_KEBIJAKAN_YANG_PRO_RAKYAT), (22 Agustus 2018 19.13 WIB).

<sup>76</sup> *Business as Usual* yakni cara berbisnis yang hanya berjalan seperti biasanya.

<sup>77</sup> CIFOR 2014\_TFD-4FS, *Indonesia: fact sheet tentang Kalimantan Tengah*, dalam [http://greengrowth.bappenas.go.id/wp-content/uploads/2018/05/20151020214928.Central\\_Kalimantan\\_Green\\_Growth\\_Report\\_BAHAS\\_A.pdf](http://greengrowth.bappenas.go.id/wp-content/uploads/2018/05/20151020214928.Central_Kalimantan_Green_Growth_Report_BAHAS_A.pdf), (18 Agustus 2018 12.29 WIB).

dengan dekomposisi lahan gambut setelah dikeringkan.<sup>78</sup> Mengingat kebakaran hutan dan lahan gambut telah menyebabkan masalah lingkungan hidup dan sosial, maka pengurangan luasan dan frekuensinya akan memberikan banyak manfaat untuk pertumbuhan ekonomi hijau. Sebagai provinsi percontohan REDD+, Kalimantan Tengah telah mengambil langkah penting untuk mengidentifikasi dan menghilangkan hambatan di aspek kebijakan, sosial dan politik agar dapat melaksanakan REDD+. Kegiatan uji coba untuk melihat pendekatan untuk restorasi ekosistem, perlindungan sosial dan lingkungan hidup, hutan kemasyarakatan, kawasan pengelolaan hutan dan rehabilitasi lahan gambut yang melibatkan partisipasi masyarakat sekitar juga dipusatkan di Provinsi Kalteng.

Penyusunan Strategi Daerah untuk REDD+ di Provinsi Kalimantan Tengah (STRADA REDD+) berawal pada tahun 2011, sejalan dengan *letter of intent* antara Pemerintah Indonesia dengan Norwegia. Adanya LoI tersebut pemerintah diharapkan ketika melakukan pengembangan strategi dan rencana aksi berdasar tujuan nasional bisa tetap memperhatikan karakteristik dan kepentingan masyarakat lokal. Visi STRADA Provinsi Kalimantan Tengah adalah *terwujudnya kelestarian sumberdaya hutan dan lahan gambut demi kesejahteraan, harkat dan martabat masyarakat Kalimantan Tengah*.<sup>79</sup>

Melalui konsultasi dengan para pemangku kepentingan, aksi prioritas diidentifikasi berdasarkan startegi provinsi, termasuk mengutamakan kebijakan pengelolaan hutan dan lahan gambut, mengembangkan lembaga pelaksana

---

<sup>78</sup> *Ibid.*

<sup>79</sup> Pemprov Kalteng, *Kalimantan Tengah Menuju Pertumbuhan Ekonomi Hijau*, dalam [http://greengrowth.bappenas.go.id/wpcontent/uploads/2018/05/20151020214928.Central\\_Kalimantan\\_Green\\_Growth\\_Report\\_BAHASA.pdf](http://greengrowth.bappenas.go.id/wpcontent/uploads/2018/05/20151020214928.Central_Kalimantan_Green_Growth_Report_BAHASA.pdf), hal 26-27, (19 September 2018 16.09 WIB).

REDD+, dan menetapkan moratorium perizinan baru di kawasan hutan. Strategi REDD+ juga memerlukan upaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang tinggal di sekitar hutan dan lahan gambut dengan cara memperkenalkan sumber pendapatan alternatif dan meningkatkan nilai produk yang dihasilkan dari wilayah tersebut. Strategi ini memerlukan pendekatan berbasis masyarakat untuk REDD+ karena masyarakat berperan penting untuk kesuksesan REDD+ dan masyarakat bisa memperoleh manfaat dari keberhasilan pelaksanaannya, berupa produk dan jasa lingkungan yang berkelanjutan, pengakuan hak atas lahan dan insentif ekonomi Kalimantan Tengah melalui Peraturan Gubernur No. 10/2012. Sehingga peran STRADA REDD+ dapat dijamin sebagai panduan Kalimantan Tengah dalam upaya pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan, serta dapat memberikan manfaat tambahan terkait dengan jasa lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan pendekatan berbasis masyarakat, STRADA REDD+ berpotensi untuk mempromosikan pertumbuhan yang menyeluruh dan merata di pedesaan, masyarakat pinggiran, dan masyarakat yang tinggal di sekitar hutan.<sup>80</sup>

Terpilihnya Provinsi Kalimantan Tengah sebagai provinsi percontohan (*pilot province*) dalam mendesain implementasi REDD+ di Indonesia tentu merupakan sebuah pilihan yang berdasarkan pada pertimbangan yang matang. Proposal provinsi percontohan yang diajukan oleh beberapa provinsi yaitu, Aceh, Jambi, Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Papua Barat dan Papua dinilai oleh Pemerintah Pusat dan

---

<sup>80</sup> *Ibid.*

akhirnya Provinsi Kalimantan Tengah terpilih dengan tingkat kelayakan keberhasilan penerapan REDD+ lebih besar dibanding provinsi lain. Melalui Kepres No. 19 Tahun 2010, Satgas REDD+ bertugas untuk melakukan penilaian atau asesmen pemilihan provinsi percontohan REDD+ di Indonesia. Indikator penilaiannya adalah: (1) penilaian kualitatif proposal provinsi percontohan yang meliputi aspek tata kelola, sosial dan ekonomi, data dan *Measurement, Reporting, and Verification* (MRV), (2) Penilaian kuantitatif akan luasan hutan atau gambut dan ancaman deforestasi yang meliputi aspek tutupan hutan dan lahan gambut, serta ancaman deforestasi.<sup>81</sup> Berdasarkan penilaian tersebut akhirnya Provinsi Kalimantan Tengah ditetapkan menjadi provinsi percontohan pada Sidang Kabinet Paripurna tanggal 23 Desember 2010 oleh Presiden Republik Indonesia saat itu Susilo Bambang Yudhoyono.<sup>82</sup>

Selain itu, Kalimantan Tengah juga terpilih karena adanya keseriusan pemerintah daerah dalam menjaga hutan dan gambut yang dapat dilihat dari kebijakan-keijakan yang dikeluarkan sebelum adanya kontestasi proposal provinsi percontohan diadakan oleh pemerintah pusat. Kebijakan sebagai bentuk reformasi birokrasi dalam mitigasi perubahan iklim yang sudah diinisiasi oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sebelum penetapan sebagai provinsi percontohan

---

<sup>81</sup> Irawan, Bambang, *Provinsi Percontohan Kalimantan Tengah. Presentasi*, Seminar REDD+, Magister Administrasi Publik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta dalam Dian Agung Wicaksono dan Ananda Prima Yurista, *Konservasi Hutan Partisipatif Melalui REDD+ (Studi Kasus Kalimantan Tengah Sebagai Provinsi Percontohan REDD+)*, Jurnal, Vol. 1, No. 2 (Agustus 2013), Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, dalam [http://download.portalgaruda.org/article.php?article=366438&val=8308&title=Konservasi%20Hutan%20Partisipatif%20Melalui%20REDD+%20\(Studi%20Kasus%20Kalimantan%20Tengah%20Sebagai%20Provinsi%20Percontohan%20REDD+\)](http://download.portalgaruda.org/article.php?article=366438&val=8308&title=Konservasi%20Hutan%20Partisipatif%20Melalui%20REDD+%20(Studi%20Kasus%20Kalimantan%20Tengah%20Sebagai%20Provinsi%20Percontohan%20REDD+)), (24 Desember 2016 18.45 WIB).

<sup>82</sup> Leony Aurora, *Strategi Daerah REDD+ dalam 2 Bulan*, dalam <https://forestsnews.cifor.org/3789/kalimantan-tengah-akan-selesaikan-strategi-daerah-redd-dalam-2-bulan?fnl=id>, (19 agustus 2018 23.09 WIB).



meliputi: aspek tata kelola pemerintahan, aspek ekonomi, sosial budaya, dan aspek lingkungan.<sup>83</sup> Dalam aspek tata kelola pemerintahan, Kalimantan Tengah menerapkan kebijakan *green province* sebagai payung dari program *green goverment policy* jauh sebelum kontestasi provinsi percontohan dimulai.<sup>84</sup> Hal tersebut dibuktikan dengan keberadaan Keputusan Gubernur Nomor 188.44/152/2010 tertanggal 11 April 2011 tentang Pembentukan Komisi Daerah Pengurangan Emisi dari Kegiatan Deforestasi dan Degradasi Hutan (REDD) serta Lahan Gambut Provinsi Kalimantan Tengah yang lahir jauh sebelum penetapan Kalimantan Tengah sebagai provinsi percontohan pada tanggal 23 Desember 2010.

Dalam konteks ekonomi, sosial dan budaya, Kalimantan Tengah relatif peka dalam melihat kondisi sosial masyarakat. Kelembagaan masyarakat hukum adat masih ada di Kalteng, oleh karena itu untuk menghindari terjadinya konflik lahan, dikeluarkan Perda Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat (yang kemudian direvisi dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010) dan Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2009 tentang Tanah Adat. Peraturan tersebut dapat menjadi dasar pemberian jaminan perlindungan hukum terhadap masyarakat hukum adat, sehingga meminimalisir terjadinya konflik antara pemerintah dan masyarakat hukum adat di Kalimantan Tengah.

---

<sup>83</sup> Narang, Agustin Teras. 2011, 30 Juni. Perkembangan Kemajuan Provinsi Percontohan REDD+ Kalimantan Tengah. Presentasi, Rapat Koordinasi Teknis Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Perubahan Iklim, Batam. dalam Dian Agung Wicaksana, *Op. Cit.* hal 5.

<sup>84</sup> Bappenas, *Model Ekonomi Hijau Provinsi Kalimantan Tengah (KT-GEM)*, dalam [http://www.id.undp.org/content/dam/indonesia/2015/lecb/doc/august2015/4\\_KTGEMProvincialNote\\_IndoEng\\_webquality.pdf](http://www.id.undp.org/content/dam/indonesia/2015/lecb/doc/august2015/4_KTGEMProvincialNote_IndoEng_webquality.pdf), (19 agustus 2018 20.08 WIB).

Beberapa inisiatif kegiatan yang telah dilakukan oleh Provinsi Kalimantan Tengah dalam upaya menjaga hutan dan lahan gambut, maka pilihan pemerintah pusat untuk menjadikan Provinsi Kalteng menjadi Provinsi Percontohan sudah tepat. Di Kalimantan Tengah, REDD+ mempunyai lima proyek yang mana masing-masing dari proyek tersebut dalam pelaksanaannya menggandeng organisasi internasional yang fokus pada pelestarian alam seperti BOS, WWF dan lain-lain. Berikut tabel daftar proyek-proyek REDD+ di Provinsi Kalimantan Tengah.

**Tabel 2.1 Daftar Proyek-Proyek REDD+ di Provinsi Kalimantan Tengah<sup>85</sup>**

| No. | Nama Proyek   | Lembaga yang Terlibat   | Tujuan dan Areal             | Lokasi                               |
|-----|---|---|------------------------------|--------------------------------------|
| 1.  | Kalimantan Forest and Climate Partnersip (KFCP)                 | Pemerintah Indonesia dan Australia bekerjasama dengan CARE, BOS, Wetlands International | AD, Adg, RS, AF (120.000 ha) | Kab. Kapuas                          |
| 2.  | A Global Peatland Capstone Project (Katingan Conservation Area) | Starling Resources, PT. Rimba Makmur Utama  | AD, Adg, RS, AF (225.000 ha) | Kab. Katingan dan Kotawaringin Timur |
| 3.  | Lamandau Wildlife Refuge  | RARE, YAYORIN, Clinton Climate Initiative (CCI)-Clinton Foundation                      | D, Adg, RS (100.000 ha)      | Kab. Lamandau                        |

<sup>85</sup> Tien Wahyuni, *Pembelajaran Dari Projek Percontohan Redd+ Pada Fase Persiapan Dan Kesiapan*, Jurnal Sosioteknologi, Volume 14, Nomor 1, April 2015, dalam <https://media.neliti.com/media/publications/41707-none-489763c0.pdf>, (14 Agustus 2018 14.24 WIB).

|    |   |   |                         |   |
|----|---|---|-------------------------|---|
| 4. | REDD dalam Taman Nasional Sebangau          | WWF/Sebangau National Park                        | RS, AD (50.000 ha)      | Kab. Katingan, Pulang Pisau, dan Palangkaraya |
| 5. | The Rimba Raya Biodiversity Reserve Project | Infinite Earth/Orangutan Foundation International | AD, Adg, RS (65.000 ha) | Kab. Seruyan                                  |

Keterangan: *Avoided Deforestation (AD)*, *Avoided Degradation (Adg)*, *Restoration (RS)*, *Reforestation (AF)*

Dalam konteks praktis, pelaksanaan REDD di Provinsi Kalimantan Tengah terdapat banyak program yang dalam kegiatannya melibatkan berbagai lapisan masyarakat, khususnya masyarakat sekitar hutan. Berbagai pelatihan diadakan untuk mendukung program REDD+ di Provinsi Kalimantan Tengah yang mengarah pada pemberdayaan masyarakat.<sup>86</sup> *Pertama*, adanya *Training of Trainer (ToT)* Guru tentang “*Education for Sustainable Development*” yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan tentang kurikulum berbasis *education for sustainable development* dan pendidikan karakter di Kalimantan Tengah, selain itu, diharapkan dapat mengubah masyarakat untuk lebih responsif dan memiliki rasa peduli yang tinggi terhadap pembangunan berkelanjutan. *Kedua*, adanya pelatihan “Masyarakat Adat dan Perubahan Iklim, Pengenalan Dasar IT, Kecerdasan Finansial, dan Pengarusutamaan Gender” agar masyarakat lebih mengetahui masalah kontemporer seperti isu gender, masyarakat adat, dan perubahan iklim serta dampaknya dalam kehidupan sehari-hari, serta

<sup>86</sup> Dian Agung Wicaksono, *Op. Cit*, hal. 7

meningkatkan kesadaran masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam usaha mitigasi terhadap perubahan iklim.

*Ketiga*, mengadakan Pelatihan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan Gambut Berbasis Masyarakat atau *Community Based Forest Fire Management*. Masyarakat sekitar hutan sebagai peserta membuat Rencana Tindak Lanjut (RTL) untuk masing-masing desa secara kolektif. RTL ini dilanjutkan dengan rencana pembentukan Tim Serbu Api atau Tim Penanggulangan Api (TSA) bagi desa yang belum membentuk TSA. Hal ini merupakan cara agar masyarakat lebih terlatih dan dapat menguatkan kelembagaan TSA yang telah ada.

*Keempat*, perwakilan Kepala Desa, Aparat Pemerintahan Desa, dan TSA dari 15 Desa atau Kelurahan di 5 Kabupaten di Kalimantan Tengah diberikan pelatihan *Citizen Journalism* untuk menambah pengetahuan dan keterampilan dalam pengelolaan sistem *Citizen Journalism* dan pelatihan pertukaran informasi yang melibatkan *Community-based Forest fire Management*. *Kelima*, Pengembangan *ecotourism* berbasis REDD+. REDD+ berupaya melestarikan hutan sehingga keanekaragaman hayati di dalam dan sekitar hutan dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Hal ini merupakan keharusan agar *ecotourism* dapat berjalan dengan baik karena jika hutan gundul atau kering tentu tidak dapat menjadi tujuan wisata yang diminati karena flora dan faunanya nyaris tidak ada. Pelaksanaan proyek *ecotourism* REDD+ dapat menjadi salah satu kegiatan yang memberikan pendapatan tambahan non-karbon. Dengan begitu, kapasitas masyarakat sekitar hutan meningkat dan bisa memperoleh keuntungan finansial. Apalagi *ecotourism* dianggap menjadi salah satu bentuk sosialisasi bagi

masyarakat yang ingin mengenal REDD+ dan keadaan hutan di Indonesia. Dengan adanya keikutsertaan masyarakat secara aktif dalam berbagai program REDD+, diharapkan dapat terbentuk pelayanan publik dalam bidang mitigasi perubahan iklim, khususnya di kawasan hutan dan lahan gambut yang partisipasi masyarakatnya baik.<sup>87</sup>



---

<sup>87</sup> *Ibid.*